

# Manajemen Keuangan Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Sekolah Ra Kawakibi Deli Serdang

Rahimah

[rahimah@umsu.ac.id](mailto:rahimah@umsu.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## ABSTRAK

Manajemen keuangan adalah salah satu konten manajemen sekolah yang akan diikuti menentukan kemajuan kegiatan pendidikan di sekolah. Seperti yang terjadi secara substansi manajemen pendidikan secara umum, kegiatan manajemen keuangan dilakukan sepanjang proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip. UU nomor 20 Pasal 48 Tahun 2003 mengatur tentang pengelolaan dana pendidikan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk tujuan manajemen keuangan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi, dan meminimalisir penyalahgunaan keuangan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola keuangan RA Kawakibi dan upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan dengan membandingkan dan menganalisis hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prasekolah Manajemen keuangan sekolah III Jebres gaya baru dalam perencanaan anggaran dilaksanakan di sekolah yang telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah dan melaksanakan RAPBS. tetapi untuk implementasi, pemantauan dan akuntabilitas. Tindakan penanggulangan yang masih belum tepat dan perlu perbaikan lebih lanjut juga merupakan salah satu upaya yang mungkin dilakukan yang dilakukan sekolah untuk mendukung sekolah secara finansial adalah bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

kata kunci: manajemen keuangan, perkembangan sekolah

## Latar belakang

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen madrasah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di madrasah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian dikarenakan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya.

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di madrasah. Karena seluruh komponen pendidikan di madrasah erat kaitannya dengan komponen keuangan madrasah. Masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas madrasah. Banyak madrasah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, maupun untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan faktor yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian

manajemen pendidikan. Komponen manajemen keuangan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan biaya, baik itu kecil maupun besar. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaikbaiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

## **Rumusan Masalah**

Manajemen keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selaludi hadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas.

## **Pembahasan**

### **Penyelenggaraan Pembukuan Dan Penyampaian Laporan**

Menurut Burhanuddin, dkk (2003:100) orang atau badan yang menerima, menyimpan, dan membahas uang atau surat-surat berharga milik Negara diwajibkan membuat catatan secara tertib teratur. Pedoman yang digunakan adalah petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 34 Keputusan Presiden No. 24 tahun 1984 disebutkan: kepala kantor, satuan kerja, pimpinan proyek, bendaharawan, dan orang atau badan yang menerima/menguasai uang Negara wajib menyelenggarakan pembukuan. Sekolah sebagai penerima uang dari berbagai sumber juga harus mengadakan pembukuan. Pembukuan mencakup: sumber dana dan besarnya, distribusi penggunaannya.

Menurut Bafadal (2012:52)Pembukuan keuangan harus dilakukan secara teratur.Artinya, pembukuan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan itu dilakukan secara tertib sebagaimana aturan-aturan pembukuan keuangan yang berlaku.Pembukuan keuangan dilakukan secara rapi yakni secara rapi, baik dalam penulisannya maupun penempatan angka-angka rupiahnya.Dengan pembukuan keuangan yang teratur dan rapi diharapkan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan dapat dengan mudah dibaca, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Burhanuddin, dkk (2003:100) pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara proyek baik fisik maupun sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib, teratur, lengkap dan “*up to date*” akan dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara teratur dan periodik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Kesimpulan**

- a. Perencanaan harus realistis  
Perencanaan harus mampu menilai alternative yang dipilih sesuai kemampuan sarana/fasilitas, daya/tenaga, dana maupun waktu.

- b. Perlunya koordinasi dalam perencanaan  
Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana/volume kegiatan sekolah yang kompleks
- c. Perencanaan harus berdasarkan pengalaman pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan
- d. Perencanaan harus fleksibel (luwes)  
Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi.
- e. Perencanaan yang didasarkan penelitian  
Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian.
- f. Perencanaan akan menghindari *under* dan *over planning*  
Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

### Daftar Pustaka

- Argyropoulou, E. (2009). Financial Management in Greek State Schools. *ISEA*, 37 (2).111-124.
- Fattah, N. (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hartman, S.J., Yrle, A.C., & Galle Jr., W.P. (1999). Procedural and distributive justice: examining equity in a university setting. *Journal of Business Ethics*, 20: 337-351
- Hayati, E. D. (2012). *Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak. Educational Management Journal*. Vol 1 (2). 143-149.
- Hurlock, E. B. (1978). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Malayu & Hasibuan, M. S.P.( 2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Sutjipto & Mukhti, B. (1992). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
- Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008
- Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009